



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan atas karunia-Nya kami dapat memberikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 kepada masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Kabupaten Tanah Datar akhir Tahun Anggaran merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ruang lingkup pembahasan mencakup progress report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Datar.

ILPPD kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. ILPPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 ini disampaikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, berupa data capaian kinerja yang disampaikan dalam penyusunan LPPD mengacu kepada surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data yang berasal dari Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar, sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan umum, desentralisasi dan tugas pembantuan.

Demikianlah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.

Batusangkar, Mei 2018

BUPATI TANAH DATAR

ttd

Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

I. DASAR HUKUM

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan sesuai dengan prinsip Good Governance, Bupati berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

ILPPD merupakan penyampaian informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran kepada masyarakat. Dasar hukum penyusunan ILPPD Kabupaten Tanah Datar ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kondisi Geografis Daerah, Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Topografis dan Penggunaan Lahan

A. Kondisi Geografis Daerah

Secara administratif Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari dan 395 Jorong dan terletak pada 00^o17' LS-00^o39' LS dan 100^o 19' BT-100^o 51'BT.

B. Batas Administrasi Daerah

Batas-batas administrasi Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Timur : Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung

C. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Tanah Datar adalah \pm 1.336 Km² atau 133.600 Ha, dengan perincian luas per kecamatan adalah sebagai berikut :

**Luas Wilayah Administrasi Kecamatan
di Kabupaten Tanah Datar**

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	X Koto	152,02	15.202	11,38
2.	Batipuh	144,26	14.426	10,80
3.	Rambatan	129,15	12.915	9,67
4.	Lima Kaum	50,00	5.000	3,74
5.	Tanjung Emas	112,05	11.205	8,39
6.	Lintau Buo	60,22	6.022	4,51
7.	Sungayang	65,45	6.545	4,90
8.	Sungai Tarab	71,85	7.185	5,38
9.	Pariangan	76,43	7.643	5,72
10.	Salimpauang	60,88	6.088	4,56
11.	Padang Ganting	83,05	8.305	6,25
12.	Tanjung Baru	43,14	4.314	3,23
13.	Lintau Buo Utara	204,31	20.431	15,29
14.	Batipuh Selatan	82,73	8.273	6,19
	Jumlah	1.336,00	133.600	100,00

Sumber : Baperlitbang, 2017

III. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021 adalah : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH DATAR YANG MADANI, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM NILAI-NILAI ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH"**

Misi

Misi merupakan upaya umum untuk mewujudkan visi pembangunan. Misi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK.
- c. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya.
2. Peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, industri, perdagangan dan lembaga keuangan.
4. Pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
5. Peningkatan infrastruktur daerah
6. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
8. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi

IV. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

I. URUSAN WAJIB

1. URUSAN PENDIDIKAN

Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara urusan wajib pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alokasi belanja Rp.491.669.560.519,- dengan realisasi sebesar Rp.449.480.823.688,64,- atau 91,42%.

2. URUSAN KESEHATAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib kesehatan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD M.Ali Hanafiah.SM Batusangkar, Sekretariat Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan dan Baperlitbang. Alokasi belanja Rp.209.971.793.605,50 dengan realisasi sebesar Rp.186.371.470.951,- atau 88,78%, dengan rincian:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alokasi belanja Rp.45.425.343,- dengan realisasi sebesar Rp.44.347.500,- atau 97,63%.
- 2) Dinas Kesehatan
Alokasi belanja Rp.120.915.562.128,50 dengan realisasi sebesar Rp.99.587.263.205,- atau 82,36%.
- 3) RSUD M.Ali Hanafiah.SM Batusangkar
Alokasi belanja Rp.88.604.180.134,- dengan realisasi sebesar Rp.86.395.370.670,- atau 97,51%.
- 4) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.154.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.119.895.450,- atau 77,75%.
- 5) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.216.600,- atau 74,78%.

-
- 6) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.14.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.496.800,- atau 99,98%.
- 7) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.075.250,- atau 87,17%.
- 8) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.13.380.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.586.200,- atau 86,59%.
- 9) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.14.907.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.178.500,- atau 68,28%.
- 10) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.929.200,- atau 99,53%.
- 11) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.14.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.910.000,- atau 75,24%.
- 12) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.841.000,- atau 98,94%.
- 13) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.14.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.886.000,- atau 99,19%.
- 14) Kecamatan Salimpauang
Alokasi belanja Rp.12.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.800.000,- atau 46,40%.
- 15) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.14.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.159.900,- atau 90,76%.
- 16) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.10.339.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.332.700,- atau 99,94%.
- 17) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp. 7.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100%.

18) Kecamatan Batipuh Selatan

Alokasi belanja Rp.11.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.819.000,- atau 91,69%.

19) Baperlitbang

Alokasi belanja Rp.65.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.62.362.976,- atau 95,94%.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, BPBD, Dinas KOPERINDAG, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah, BAPERLITBANG. Alokasi belanja Rp.146.802.048.381,- realisasi sebesar Rp.129.080.473.088,- atau 87,93%, dengan rincian:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Alokasi belanja Rp.139.620.101,- dengan realisasi sebesar Rp.137.330.000,- atau 98,36%.

2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Alokasi belanja Rp.134.600.235.882,- dengan realisasi sebesar Rp.118.956.238.974,- atau 88,38%.

3) BPBD

Alokasi belanja Rp.3.791.707.862,- dengan realisasi sebesar Rp.3.311.639.549,- atau 87,34%.

4) Dinas KOPERINDAG

Alokasi belanja Rp.6.915.193.636,- dengan realisasi sebesar Rp.5.491.114.453,- atau 79,41%.

5) Dinas Pertanian

Alokasi belanja Rp.818.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.695.632.235,- atau 85,04%.

6) Sekretariat Daerah

Alokasi belanja Rp.69.710.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.793.989,- atau 75,73%.

7) BAPERLITBANG

Alokasi belanja Rp.467.580.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 435.723.888,- atau 93,19%.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas PERKIM LH, SAT POL PP dan DAMKAR, Dinas Sosial, PP dan PA.

Alokasi belanja Rp.6.105.782.200,- realisasi sebesar Rp.5.643.348.610,- atau 92,43%, dengan rincian:

- 1) Dinas PERKIM LH
Alokasi belanja Rp.4.079.244.500,- dengan realisasi sebesar Rp.3.786.256.598,- atau 92,82%.
- 2) SAT POL PP dan DAMKAR
Alokasi belanja Rp.1.824.087.700,- dengan realisasi sebesar Rp.1.693.936.630,- atau 92,86%.
- 3) Dinas Sosial, PP dan PA
Alokasi belanja Rp.202.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.163.155.382,- atau 80,59%.

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah SAT POL PP dan DAMKAR, Kantor Kesbangpol, BPBD, Dinas PMD PP dan KB, Sekretariat Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan.

Alokasi belanja Rp.29.176.360.083,- dengan realisasi sebesar Rp.26.063.052.152,- atau 89,33%, dengan rincian:

- 1) SAT POL PP dan DAMKAR
Alokasi belanja Rp.7.997.345.600,- dengan realisasi sebesar Rp.7.579.266.444,- atau 94,77%.
- 2) Kantor Kesbangpol
Alokasi belanja Rp.3.828.275.200,- dengan realisasi sebesar Rp.2.976.282.084,- atau 77,74%.

- 3) BPBD
Alokasi belanja Rp.3.586.504.870,- dengan realisasi sebesar Rp.3.292.233.131,- atau 91,8%.
- 4) Dinas PMD PP dan KB
Alokasi belanja Rp.3.944.976.300,- dengan realisasi sebesar Rp.3.258.037.358,- atau 82,59%.
- 5) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.8.667.127.913,- dengan realisasi sebesar Rp.7.909.675.422,- atau 91,26%.
- 6) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.107.781.400,- dengan realisasi sebesar Rp.63.846.855,- atau 59,24%.
- 7) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.147.055.000,- dengan realisasi sebesar Rp.146.662.600,- atau 99,73%.
- 8) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.90.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp.85.636.982,- atau 94,99%.
- 9) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.71.891.000,- dengan realisasi sebesar Rp.64.821.850,- atau 90,17%.
- 10) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.72.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.59.695.200,- atau 82,91%.
- 11) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.84.608.000,- dengan realisasi sebesar Rp.73.656.000,- atau 87,06%.
- 12) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.64.067.000,- dengan realisasi sebesar Rp.59.212.240,- atau 92,42%.
- 13) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.111.449.600,- dengan realisasi sebesar Rp.110.144.600,- atau 98,83%.
- 14) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.81.452.000,- dengan realisasi sebesar Rp.78.703.500,- atau 96,63%.

- 15) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.76.224.000,- dengan realisasi sebesar Rp.73.632.920,- atau 96,60%.
- 16) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.48.360.000,- dengan realisasi sebesar Rp.43.355.270,- atau 89,65%.
- 17) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.63.307.000,- dengan realisasi sebesar Rp.61.057.700,- atau 96,45%.
- 18) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.76.688.200,- dengan realisasi sebesar Rp.76.559.800,- atau 99,83%.
- 19) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp.57.097.000,- dengan realisasi sebesar Rp.50.572.200,- atau 88,57%.

6. URUSAN SOSIAL

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara urusan sosial adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, PP dan PA dan Sekretariat Daerah. Alokasi belanja untuk urusan sosial Rp.5.697.203.403,- dengan realisasi sebesar Rp.5.405.721.162,- atau 94,88%, dengan rincian:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alokasi belanja Rp.43.975.703,- dengan realisasi sebesar Rp.32.528.700,- atau 73,97%.
- 2) Dinas Sosial, PP dan PA
Alokasi belanja Rp.5.483.127.700,- dengan realisasi sebesar Rp.5.223.143.413,- atau 95,26%.
- 3) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.170.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.150.049.049,- atau 88,21%.

7. URUSAN TENAGA KERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara urusan Tenaga Kerja adalah Dinas PMPTSP DAN NAKER. Alokasi belanja Rp.908.620.200,- dengan realisasi sebesar Rp.572.431.747,- atau 63,00%.

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, PP dan PA dan BAPERLITBANG. Alokasi belanja untuk urusan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp.1.214.537.400,- dengan realisasi Rp.1.057.163.520,- atau 87,04%, dengan rincian:

- 1) Dinas Sosial, PP dan PA
Alokasi belanja Rp.1.183.537.400,- dengan realisasi sebesar Rp.1.026.181.620,- atau 86,70%
- 2) BAPERLITBANG
Alokasi belanja Rp.31.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.30.981.900,- atau 99,94%

9. URUSAN PANGAN

Perangkat Daerah penyelenggara urusan pangan adalah Dinas Pangan dan Perikanan dan Dinas Pertanian. Alokasi belanja sebesar Rp. 6.255.902.600,- dengan realisasi Rp. 5.849.129.662,- atau 93,50%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dinas Pangan dan Perikanan
Alokasi belanja sebesar Rp.4.750.199.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.460.713.925,- atau 93,91%.
- 2) Dinas Pertanian
Alokasi belanja sebesar Rp.1.505.703.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.388.415.737,- atau 92,21%.

10. URUSAN PERTANAHAN

Perangkat Daerah penyelenggara urusan pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Koperindag, Dinas Parpora dan Kecamatan X Koto. Alokasi belanja untuk urusan pertanahan adalah sebesar Rp.3.551.407.500,- dengan realisasi sebesar Rp.694.064.384,- atau 19,54%, dengan rincian:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Alokasi belanja sebesar Rp.150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.137.063.784,- atau 91,38%.
- 2) Dinas Koperindag
Alokasi belanja sebesar Rp.5.407.500,- dengan realisasi sebesar Rp.5.407.500,- atau 100%.

3) Dinas Parpora

Alokasi belanja sebesar Rp.1.999.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 545.866.700,- atau 27,31%.

Rendahnya realisasi kegiatan disebabkan semula direncanakan untuk pengadaan tanah seluas 2,5 Ha untuk pengembangan kawasan Istano Basa Pagaruyung, terealisasi seluas 1.500 M².

4) Kecamatan X Koto

Alokasi belanja sebesar Rp.1.397.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.726.400,- atau 0,41%.

Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan semula untuk pengadaan tanah Kantor Camat X Koto namun tidak terlaksana karena lokasi tidak cocok dengan peruntukan ruang sesuai RTRW.

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Perangkat daerah penyelenggara urusan lingkungan hidup adalah Dinas PERKIM LH, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah dan Baperlitbang. Alokasi belanja Rp. 5.308.816.440,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.443.506.093,- atau 83,70%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas PERKIM LH

Alokasi belanja sebesar Rp.4.458.418.840,- dengan realisasi sebesar Rp. 530.929.800,- atau 83,64%.

2) Dinas Pangan dan Perikanan

Alokasi belanja sebesar Rp.627.220.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.728.954.806,- atau 84,65%.

3) Dinas Pertanian

Alokasi belanja sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.91.796.400,- atau 91,80%.

4) Sekretariat Daerah

Alokasi belanja sebesar Rp. 58.654.000,- dengan realisasi sebesar Rp.29.911.650,- atau 51,00%.

5) Baperlitbang

Alokasi belanja sebesar Rp. 64.523.600,- dengan realisasi sebesar Rp.61.913.437,- atau 95,95%.

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

Perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan capil, adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan. Alokasi belanja Rp.6.777.192.600,- dengan realisasi sebesar Rp.6.052.997.692,94,- atau 89,42%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Alokasi belanja sebesar Rp. 6.694.395.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.979.493.592,94 atau 89,32%.
- 2) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.395.000,-atau 87,90%.
- 3) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja sebesar Rp.9.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.442.200,-atau 99,39%.
- 4) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.992.450,-atau 99,92%.
- 5) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.980.000,-atau 99,60%.
- 6) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.730.000,-atau 94,60%.
- 7) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja sebesar Rp.5.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.625.200,-atau 94,70%.
- 8) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja sebesar Rp.4.545.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.895.000,-atau 85,70%.
- 9) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.830.000,- atau 96,60%

- 10) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.990.000,- atau 99,83%.
- 11) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja sebesar Rp.4.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.495.000,- atau 99,89%.
- 12) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja sebesar Rp.3.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.984.000,- atau 98,16%.
- 13) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja sebesar Rp.6.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.384.650,- atau 98,23%.
- 14) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja sebesar Rp.4.272.200,- dengan realisasi sebesar Rp.4.272.200,- atau 100,00%.
- 15) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja sebesar Rp.8.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.488.400,- atau 99,86%.

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Perangkat daerah penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah Dinas Sosial, PP dan PA, Dinas PMD PP dan KB, Sekretariat Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan dan Baperlitbang. Alokasi belanja Rp.14.979.459.450,- dengan realisasi sebesar Rp.13.839.905.385,- atau 92,39%, dengan rincian:

- 1) Dinas Sosial, PP dan PA
Alokasi belanja Rp.1.045.624.600,- dengan realisasi sebesar Rp.1.009.823.596,- atau 96,58%.
- 2) Dinas PMD PP dan KB
Alokasi belanja Rp.12.077.737.815,- dengan realisasi sebesar Rp.11.159.775.608,- atau 92,40%
- 3) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.252.327.435,- dengan realisasi sebesar Rp.192.098.841,- atau 76,13%

-
- 4) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.138.084.100,- dengan realisasi sebesar Rp.121.061.800,- atau 87,67%.
 - 5) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.129.557.300,- dengan realisasi sebesar Rp.123.099,900,- atau 95,02%
 - 6) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.121.909.800,- dengan realisasi sebesar Rp.111.026.150,- atau 91,07%
 - 7) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.95.168.000,- dengan realisasi sebesar Rp.85.251.000,- atau 89,58%
 - 8) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.105.962.000,- dengan realisasi sebesar Rp.95.444.150,- atau 90,07%
 - 9) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.97.323.500,- dengan realisasi sebesar Rp.90.105.350,- atau 92,58%
 - 10) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.93.689.000,- dengan realisasi sebesar Rp.85.551.700,- atau 91,31%
 - 11) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.127.657.000,- dengan realisasi sebesar Rp.121.312.200,- atau 95,03%
 - 12) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.105.075.100,- dengan realisasi sebesar Rp.102.219.900,- atau 97,28%
 - 13) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.108.678.000,- dengan realisasi sebesar Rp.86.413.970,- atau 79,51%
 - 14) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.84.467.000,- dengan realisasi sebesar Rp.77.035.300,- atau 91,20%
 - 15) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.101.718.000,- dengan realisasi sebesar Rp.98.087.900,- atau 96,43%.

- 16) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.102.381.800,- dengan realisasi sebesar Rp.98.316.200,- atau 96,03%
- 17) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp.94.099.000,- dengan realisasi sebesar Rp.90.578.020,- atau 96,26%
- 18) Baperlitbang
Alokasi belanja Rp.98.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.92.703.800,- atau 94,60%

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Perangkat daerah penyelenggara urusan pengendalian penduduk keluarga berencana adalah Dinas PMD PP dan KB. Alokasi belanja Rp. 2.576.996.035,- dengan realisasi sebesar Rp.2.102.214.000,- atau 81,58%.

15. URUSAN PERHUBUNGAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah. Alokasi belanja Rp.5.947.996.919,- dengan realisasi sebesar Rp.5.407.140.644,- atau 90,91%, dengan rincian:

- 1) Dinas Perhubungan
Alokasi belanja Rp.5.916.013.319,- dengan realisasi sebesar Rp.5.376.689.444,- atau 90,88%.
- 2) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja sebesar Rp.31.983.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.451.200,- atau 95,21%.

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perangkat daerah penyelenggara urusan komunikasi dan informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan. Alokasi belanja untuk urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp.8.241.337.590,- dengan realisasi sebesar Rp.7.579.813.051,- atau 91,97%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi belanja Rp.6.043.194.790,- dengan realisasi sebesar Rp.5.527.720.333,- atau 91,47%.
- 2) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.1.805.692.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.702.424.918,- atau 94,28%.

3) Sekretariat Dewan

Alokasi belanja Rp.392.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp.349.667.800,- atau 89,10%.

17. URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Perangkat daerah penyelenggara urusan koperasi usaha kecil dan menengah adalah Dinas Koperindag dan Sekretariat Daerah. Alokasi belanja Rp.5.366.842.799,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.030.447.091,- atau 93,73%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Koperindag

Alokasi belanja Rp.5.191.939.400,- dengan realisasi sebesar Rp.4.874.941.205,- atau 93,89%.

2) Sekretariat Daerah

Alokasi belanja Rp.174.903.399,- dengan realisasi sebesar Rp.155.505.886,- atau 88,91%.

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

Perangkat daerah penyelenggara urusan penanaman modal adalah Dinas PMPTSP dan NAKER. Alokasi belanja Rp.3.700.967.900,- dengan realisasi sebesar Rp.3.602.142.356,- atau 97,33%.

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Perangkat daerah penyelenggara urusan kepemudaan dan olah raga adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Parpora, Sekretariat Daerah, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Batipuh Selatan. Alokasi belanja Rp.6.011.736.600,- dengan realisasi sebesar Rp.4.979.218.283,- atau 82,82%, dengan rincian:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Alokasi belanja Rp.285.950.300,- dengan realisasi sebesar Rp.206.970.325,- atau 72,38%

2) Dinas Parpora

Alokasi belanja Rp.4.544.556.300,- dengan realisasi sebesar Rp.3.645.323.769,- atau 80,21%

- 3) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.87.242.650,- atau 87,24%
- 4) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.75.962.000,- dengan realisasi sebesar Rp.70.911.600,- atau 93,35%
- 5) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.98.901.500,- dengan realisasi sebesar Rp.98.700.300,- atau 99,80%
- 6) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.94.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.93.051.574,- atau 98,16%
- 7) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.59.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp.57.541.000,- atau 96,68%
- 8) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.79.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp.68.590.200,- atau 86,30%.
- 9) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.61.191.000,- dengan realisasi sebesar Rp.61.054.300,- atau 99,78%
- 10) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.70.525.000,- dengan realisasi sebesar Rp.69.006.690,- atau 97,85%
- 11) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.92.635.000,- dengan realisasi sebesar Rp.92.461.000,- atau 99,81%
- 12) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.81.436.000,- dengan realisasi sebesar Rp.80.846.950,- atau 99,28%
- 13) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.69.902.000,- dengan realisasi sebesar Rp.63.648.600,- atau 91,05%
- 14) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.82.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.70.088.275,- atau 85,47%.

- 15) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.69.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp.68.565.550,- atau 98,70%
- 16) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.69.470.500,- dengan realisasi sebesar Rp.69.470.500,- atau 100,00%
- 17) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp.75.937.000,- dengan realisasi sebesar Rp.75.745.000,- atau 99,75%

20. URUSAN STATISTIK

Perangkat daerah penyelenggara urusan statistik adalah Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Batipuh Selatan dan BKD. Alokasi belanja sebesar Rp.829.365.000,- dengan realisasi Rp.196.524.833,- atau 23,70%, dengan rincian:

- 1) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.938.500,- atau 99,39%
- 2) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.993.300,- atau 99,93%
- 3) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.993.200,- atau 99,93%
- 4) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.402.000,- atau 94,02%
- 5) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.5.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp.5.350.000,- atau 100,00%
- 6) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.934.400,- atau 99,34%

- 7) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.8.842.500,- dengan realisasi sebesar Rp.5.870.000,-
atau 66,38%
- 8) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.8.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.500.000,-
atau 100,00%
- 9) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.8.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.661.000,-
atau 98,98%
- 10) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.7.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.325.000,-
atau 81,61%
- 11) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.6.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.025.000,-
atau 98,77%
- 12) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.8.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.962.450,-
atau 99,53%
- 13) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp. 9.642.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.642.500,-
atau 100,00%
- 14) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp. 8.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.275.000,-
atau 99,70%
- 15) BKD
Alokasi belanja Rp.708.130.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.80.652.483,- atau 11,39%

21. URUSAN KEBUDAYAAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Batipuh Selatan. Alokasi belanja Rp.1.008.674.900,- dengan realisasi sebesar Rp.906.296.486,- atau 89,85%, dengan rincian:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alokasi belanja Rp.763.962.900,- dengan realisasi sebesar Rp.703.166.000,- atau 92,04%
- 2) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.22.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.612.600,- atau 70,97%
- 3) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.13.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.975.000,- atau 99,81%
- 4) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.22.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.21.931.136,- atau 96,40%
- 5) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.19.970.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.519.000,- atau 52,67%
- 6) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.21.280.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.452.800,- atau 53,82%
- 7) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.21.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.17.007.300,- atau 80,99%
- 8) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.14.145.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.501.400,- atau 95,45%
- 9) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.19.130.000,- dengan realisasi sebesar Rp.17.157.000,- atau 89,69%
- 10) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.28.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.24.231.000,- atau 86,54%
- 11) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.16.195.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.662.500,- atau 96,71%
- 12) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.11.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.330.000,- atau 93,91%.

13) Kecamatan Tanjung Baru

Alokasi belanja Rp.16.728.000,- dengan realisasi sebesar Rp.13.272.750,- atau 79,34%

14) Kecamatan Lintau Buo Utara

Alokasi belanja Rp.6.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.575.000,- atau 99,62%

15) Kecamatan Batipuh Selatan

Alokasi belanja Rp.12.914.000,- dengan realisasi sebesar Rp.12.903.000,- atau 99,91%

22. URUSAN PERPUSTAKAAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan PERPUSTAKAAN adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alokasi belanja sebesar Rp. 5.604.596.718,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.359.354.471,- atau 95,62%.

23. URUSAN KEARSIPAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan wajib kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alokasi belanja Rp. 364.690.991,- dengan realisasi sebesar Rp. 321.564.700,- atau 88,17%.

II. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan kelautan dan perikanan adalah Dinas Pangan dan Perikanan. Alokasi belanja Rp.3.289.290.437,- dengan realisasi sebesar Rp.2.547.422.614,- atau 77,45%.

2. URUSAN PARIWISATA

Perangkat daerah penyelenggara urusan pariwisata adalah Dinas Parpora dan Sekretariat Daerah. Alokasi belanja Rp. 13.977.346.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.104.433.572,- atau 86,60%, dengan rincian:

1) Dinas Parpora

Alokasi belanja Rp.13.938.846.600,- dengan realisasi sebesar Rp.12.077.830.822,- atau 86,65%

2) Sekretariat Daerah

Alokasi belanja Rp.38.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.26.602.750,- atau 69,10%

3. URUSAN PERTANIAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan pertanian adalah Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah. Alokasi belanja Rp.23.087.940.361,- dengan realisasi sebesar Rp.20.473.568.089,- atau 88,68%, dengan rincian:

- 1) Dinas Pangan dan Perikanan
Alokasi belanja Rp.151.421.000,- dengan realisasi sebesar Rp.131.978.500,- atau 87,16%
- 2) Dinas Pertanian
Alokasi belanja Rp.22.849.704.161,- dengan realisasi sebesar Rp.20.267.805.323,- atau 88,70%
- 3) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.86.815.200,- dengan realisasi sebesar Rp.73.784.266,- atau 84,99%

4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Perangkat daerah penyelenggara urusan energi dan sumber daya mineral adalah Dinas PMPTSP dan NAKER. Alokasi belanja Rp. 257.384.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 255.749.172,- atau 99,36%.

5. URUSAN PERDAGANGAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan perdagangan adalah Dinas Koperindag dan Sekretariat Daerah. Alokasi belanja Rp. 2.579.584.800,- dengan realisasi sebesar Rp.2.391.162.923,- atau 92,70%, dengan rincian:

- 1) Dinas Koperindag
Alokasi belanja Rp.2.531.104.800,- dengan realisasi sebesar Rp.2.350.279.423,- atau 92,86%.
- 2) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.48.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp.40.883.500,- atau 84,33%.

6. URUSAN PERINDUSTRIAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan perindustrian adalah Dinas Koperindag. Alokasi belanja Rp.3.313.808.600,- dengan realisasi sebesar Rp.3.162.314.291,- atau 95,43%.

B. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan adalah Dinas PMPTSP dan NAKER, DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Batipuh Selatan. Alokasi belanja Rp.93.544.233.466,- dengan realisasi sebesar Rp.84.213.774.585,- atau 90,03%, dengan rincian:

- 1) Dinas PMPTSP dan NAKER
Alokasi belanja Rp.535.467.000,- dengan realisasi sebesar Rp.522.268.270,- atau 97,54%.
- 2) DPRD
Alokasi belanja Rp.9.451.345.600,- dengan realisasi sebesar Rp.8.367.849.245,- atau 88,54%.
- 3) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Alokasi belanja Rp.760.139.100,- dengan realisasi sebesar Rp.759.241.739,- atau 99,88%.
- 4) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.32.686.351.968,- dengan realisasi sebesar Rp.29.159.110.270,- atau 89,21%.
- 5) Sekretariat Dewan
Alokasi belanja Rp.29.208.266.790,- dengan realisasi sebesar Rp.25.409.950.957,- atau 87,00%.
- 6) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.1.567.141.600,- dengan realisasi sebesar Rp.1.484.858.306,- atau 94,75%.
- 7) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.1.564.264.500,- dengan realisasi sebesar Rp.1.483.127.480,- atau 94,81%.
- 8) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.1.424.176.800,- dengan realisasi sebesar Rp.1.381.732.405,- atau 97,02%.

-
- 9) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.1.611.891.200,- dengan realisasi sebesar Rp.1.529.522.574,- atau 94,89%.
- 10) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.1.428.298.900,- dengan realisasi sebesar Rp.1.354.128.410,- atau 94,81%.
- 11) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.1.349.257.500,- dengan realisasi sebesar Rp.1.270.139.249,- atau 94,14%.
- 12) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.1.219.284.100,- dengan realisasi sebesar Rp.1.171.542.499,- atau 96,08%.
- 13) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.1.501.806.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.458.387.037,- atau 97,11%.
- 14) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.2.300.401.200,- dengan realisasi sebesar Rp.2.192.803.395,- atau 95,32%.
- 15) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.1.339.930.250,- dengan realisasi sebesar Rp.1.295.829.412,- atau 96,71%.
- 16) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.1.396.648.058,- dengan realisasi sebesar Rp.1.293.141.318,- atau 92,59%.
- 17) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.1.313.014.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.275.895.256,- atau 97,17%.
- 18) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.1.533.885.600,- dengan realisasi sebesar Rp.1.505.899.288,- atau 98,18%.
- 19) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp.1.352.663.300,- dengan realisasi sebesar Rp.1.298.347.475,- atau 95,98%.

2. PENGAWASAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat, Baperlitbang dan BKD. Alokasi belanja Rp.5.358.801.300,- dengan realisasi sebesar Rp.5.051.487.138,- atau 94,27%, dengan rincian:

- 1) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.212.775.400,- dengan realisasi sebesar Rp.139.419.073,- atau 65,52%.
- 2) Inspektorat
Alokasi belanja Rp.5.072.025.900,- dengan realisasi sebesar Rp.4.844.679.815,- atau 95,52%.
- 3) Baperlitbang
Alokasi belanja Rp.44.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.38.243.850,- atau 86,92%.
- 4) BKD
Alokasi belanja Rp.30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.29.144.400,- atau 97,15%.

3. PERENCANAAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan adalah Dinas Kesehatan, Dinas PMD, PP dan KB, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperindag, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah dan Baperlitbang. Alokasi belanja Rp.9.569.559.952,- dengan realisasi sebesar Rp.8.313.918.368,- atau 86,88%, dengan rincian:

- 1) Dinas Kesehatan
Alokasi belanja Rp.61.657.000,- dengan realisasi sebesar Rp.54.204.000,- atau 87,91%.
- 2) Dinas PMD, PP dan KB
Alokasi belanja Rp. 55.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.37.018.200,- atau 67,31%.
- 3) Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi belanja Rp. 55.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.51.327.290,- atau 93,32%.
- 4) Dinas Koperindag
Alokasi belanja Rp.38.165.000,- dengan realisasi sebesar Rp.38.091.000,- atau 99,81%.

- 5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Alokasi belanja Rp.5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.795.000,- atau 95,90%.
- 6) Dinas Pertanian
Alokasi belanja Rp.585.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.558.835.000,- atau 95,53%.
- 7) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.1.447.645.152,- dengan realisasi sebesar Rp.1.143.992.260,- atau 79,02%.
- 8) Baperlitbang
Alokasi belanja Rp.7.322.092.800,- dengan realisasi sebesar Rp.6.425.655.618,- atau 87,76%.

4. KEUANGAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PMPTSP dan NAKER, Dinas PMPTSP dan NAKER, Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Salimpauang, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Batipuh Selatan dan BKD. Alokasi belanja Rp. 211.504.950.797,73 dengan realisasi sebesar Rp. 202.400.043.093,- atau 95,70%, dengan rincian:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Alokasi belanja Rp.106.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.101.449.200,- atau 94,90%.
- 2) Dinas Kesehatan
Alokasi belanja Rp.70.409.750,- dengan realisasi sebesar Rp.56.872.900,- atau 80,77%.
- 3) Dinas PMPTSP dan NAKER
Alokasi belanja Rp.22.644.500,- dengan realisasi sebesar Rp.22.530.000,- atau 99,49%.
- 4) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.171.677.000,- dengan realisasi sebesar Rp.149.851.679,- atau 87,29%.
- 5) Kecamatan X Koto
Alokasi belanja Rp.26.929.500,- dengan realisasi sebesar Rp.25.509.400,- atau 94,73%.

- 6) Kecamatan Batipuh
Alokasi belanja Rp.36.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.36.670.100,- atau 99,38%.
- 7) Kecamatan Rambatan
Alokasi belanja Rp.23.076.000,- dengan realisasi sebesar Rp.22.937.850,- atau 99,40%.
- 8) Kecamatan Lima Kaum
Alokasi belanja Rp.25.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.25.397.600,- atau 99,60%.
- 9) Kecamatan Tanjung Emas
Alokasi belanja Rp.13.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.915.300,- atau 83,96%.
- 10) Kecamatan Lintau Buo
Alokasi belanja Rp.23.264.000,- dengan realisasi sebesar Rp.22.849.200,- atau 98,22%.
- 11) Kecamatan Sungayang
Alokasi belanja Rp.15.883.500,- dengan realisasi sebesar Rp.15.451.100,- atau 97,28%.
- 12) Kecamatan Sungai Tarab
Alokasi belanja Rp.25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.24.926.000,- atau 99,70%.
- 13) Kecamatan Pariangan
Alokasi belanja Rp.18.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.17.697.000,- atau 98,32%.
- 14) Kecamatan Salimpaung
Alokasi belanja Rp.20.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.20.661.750,- atau 99,57%.
- 15) Kecamatan Padang Ganting
Alokasi belanja Rp.13.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.601.000,- atau 78,53%.
- 16) Kecamatan Tanjung Baru
Alokasi belanja Rp.8.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.392.100,- atau 98,73%.
- 17) Kecamatan Lintau Buo Utara
Alokasi belanja Rp.16.843.000,- dengan realisasi sebesar Rp.16.829.000,- atau 99,92%.

-
- 18) Kecamatan Batipuh Selatan
Alokasi belanja Rp.23.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.22.879.200,- atau 99,47%.
- 19) BKD
Alokasi belanja Rp.210.843.173.547,73 dengan realisasi sebesar Rp.201.787.622.714,- atau 95,71%.

5. KEPEGAWAIAN

Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian adalah Sekretariat Daerah dan BKPSDM. Alokasi belanja Rp. 9.000.749.297,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.874.078.357,- atau 87,48%, dengan rincian:

- 1) Sekretariat Daerah
Alokasi belanja Rp.548.306.497,- dengan realisasi sebesar Rp.456.851.533,- atau 83,32%.
- 2) BKPSDM
Alokasi belanja Rp.8.452.442.800,- dengan realisasi sebesar Rp.7.417.226.824,- atau 87,75%.

C. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan umum adalah Kantor Kesbangpol. Alokasi belanja Rp.93.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.55.243.600,- atau 59,40%

V. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

Program dan kegiatan nasional yang dijabarkan di daerah, khususnya di Kabupaten Tanah Datar terdiri atas dua dimensi, yaitu Dimensi Sektor Unggulan dan Dimensi Pembangunan Manusia. Kemudian ada lima program nasional yang kemudian dijabarkan menjadi 14 macam program di daerah yang ditindaklanjuti pula dengan beberapa kegiatan. Dengan demikian RKP 2017 telah direalisasikan di Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun anggaran 2017, tugas pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 3 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah antara lain:

- A. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, sebanyak 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan dengan dana Rp.532.243.000,- realisasi sebesar Rp.524.458.250,- atau 98,54%%.
- B. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan dana sebesar Rp.6.000.000.000,- realisasi sebesar Rp.5.219.595.000,- atau 87,36.%

VII. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pada tahun 2017 pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar meliputi

A. Kerjasama Antar Daerah

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kerjasama antar daerah antara lain :

1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2/SPJ/BTD/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Rencana Pengembangan Kawasan BUKAPALIPATAR.
2. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/SPJ/BTD/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemajuan Kebudayaan.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Telah dilaksanakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga antara lain:

1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi Nomor 445/86/MOU/RSUD/BSK-2017 dan Nomor HK.0301/XXVIII/525/ 2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Rujukan Pasien.
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSJ Prof. HB. Saanin Padang Nomor 445/96/MOU/RSUD/BSK-2017 dan Nomor 441/01.A/YM/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Rujukan Pasien Jiwa.
3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD dr Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor 440/103/RSUD/MOU/RSUD-BSK/X/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Patologi Klinik).
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri Padang Nomor 440/98/MOU/RSUD/BSK-2017 dan Nomor 164/DIR-RPS/XII/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Rujukan Pasien Bedah.
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan dr. Spesialis Kesehatan Jiwa Nomor 446/07/MOU/RSUD/BSK-2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang Kunjungan Referral Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa.
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Harian Umum Haluan Nomor 489/01/Humas dan Protokol-2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penerbitan Kerjasama Varia Daerah pada Koran Harian Umum Haluan di Kabupaten Tanah Datar.
7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Harian Pagi Padang Ekspres Nomor 489/02/Humas dan Protokol-2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penerbitan Kerjasama Varia Daerah pada Koran Harian Pagi Padang Ekspres di Kabupaten Tanah Datar.
8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Harian Umum Singgalang Nomor 489/03/Humas dan Protokol-2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penerbitan Kerjasama Varia Daerah pada Koran Harian Umum Independen Singgalang di Kabupaten Tanah Datar.
9. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD Padang Panjang Nomor 445/91/MOU/RSUD/BSK/I-2017 dan Nomor 420/60/RSUD-PP/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Kerjasama Pelayanan Pasien.

10. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Klinik Utama Suci Medika Nomor 02/001/KU-SM/I/2017 dan Nomor 445/01/PK/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemeriksaan Laboratorium.
11. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Nomor 446/04/MOU/RSUD/BSK-2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Referral Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa.
12. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Dokter Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan Nomor 446/05/MOU/RSUD/BSK-2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Referral Dokter Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan.
13. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Nomor 446/15/MOU/RSUD/BSK-2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Referral Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin.
14. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh Nomor 446/24/MOU/RSUD/BSK-2017 dan Nomor 445/008/PKS/RSUD-PYK/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Kunjungan Referral Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin.
15. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Dokter Spesialis Paru Nomor 446/06/MOU/RSUD/BSK-2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Referral Dokter Spesialis Paru.
16. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Nomor 446/07/MOU/RSUD/BSK-2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Kunjungan Referral Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi.
17. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan PT. Mufid Inti Global Nomor 660/10/KJS/LB3/RSUD/2017 dan Nomor 003/KJS/LB3/MIG/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
18. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan PT. Tenang Jaya Sejahtera dan PT. Mufid Inti Global Nomor 660/11/KJS/LB3/RSUD/2017, Nomor 010/KJS/LB3/TJS/II/201 dan Nomor 004/KJS/LB3/MIG/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
19. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan dr Doddy Pratama Sp.OG Nomor 446/102/MOU/RSUD/BSK-2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pelayanan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi.

20. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan dr Cyntia Afriany, Sp.An Nomor 446/101/MOU/RSUD/BSK-2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pelayanan Dokter Spesialis Anestesiologi.
21. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Balai Diklat Industri Padang Nomor 798/SJ-IND.7.19/2017 dan Nomor 530/630/III.3/Koperindag-TD/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelatihan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah.
22. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD Kota Padang Panjang Nomor 800/55/RSUD-PP/VII/2017 dan Nomor 446/33/SPK/RSUD-BSK/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Kunjungan Referral Dokter Spesialis Radiologi.
23. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan PT. Mitra Medika Nomor 447/111/PKS-RSU/2017 dan Nomor 001/MPM/PKS/VII/17 tanggal 29 Juli 2017 tentang Penempatan Alat Hemodialisa di RSUD Prof. DR. M. Ali Hanafiah, SM.
24. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Badan Pengkajian dengan Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor /PKS/BPPT-Pemkab,Tanah Datar/VII/2017 dan Nomor 413/65-Pemb-2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penerapan Teknologi Pengelolaan Air Siap Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
25. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD Sawahlunto Nomor 446/75/MOU/RSUD/BSK/IX-2017 dan Nomor 446/RSUD/SWL/ 2017 tanggal 18 September 2017 tentang Kunjungan Referral Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah..
26. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 57b/KB/BPPT-Pemkab. Tanah Datar/09/2017 dan Nomor 600/655/DPU-CK-2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasaryakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
27. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD Sawahlunto Nomor 014/RSUD/SWL/2017 dan Nomor 446/77/SPK/RSUD-BSK/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pelayanan Reveral Dokter Spesialis Syaraf.

28. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD Sawahlunto Nomor 015/RSUD/SWL/2017 dan Nomor 440/76/MOU/RSUD-BSK/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Rujukan Parsial Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Patologi Anatomi).
29. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Kepolisian Resort Tanah Datar Nomor 812/549/DPMPSTP dan NAKER/2017 dan Nomor B/1179/XII/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Pembekalan Putra Putri Kabupaten Tanah Datar Dalam Memenuhi Kriteria Untuk Mengikuti Seleksi Calon Anggota POLRI.
30. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUP dr.M.Djamil Padang Nomor HK.03.01/I/1909/2017 dan Nomor 440/93/MOU/RSUD/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pelayanan Kesehatan.
31. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Batusangkar Nomor 900/898/PKS/BKD-TD/10-2017 dan Nomor SR/015/PKS.BS/10-2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada Pemerintah Daerah..
32. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD dr Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor 440/109/MOU/RSUD/BSK-2017 dan Nomor 445/13978/ RSAM/XII/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pelayanan Kamar Jenazah.
33. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan PT. Noor Annisa Kemikal Nomor 660/88/KJS/LB3/RSUD/2017 dan 040.2/EXT-NAK/XII/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
34. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pusat Pelatihan Klinik Sekunder Kesehatan Reproduksi (P2KS-KR) Nomor 440/110/MOU-RSUD/2017 tanggal November 2017 tentang Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)..
35. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan RSUD dr Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor 445/90/MOU/RSUD/BSK-2017 dan Nomor 445/13977/ RSAM/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Rujukan Pasien.

36. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor 451/97/RSUD-Hanafiah/MoU/XII/2017 dan Nomor 289 Tahun 2017 tanggal 29 November 2017 tentang Pelayanan Bimbingan Rohani Bagi Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. MA. Hanafiah, SM Batusangkar.
37. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Payakumbuh Nomor 04/BP-DINKES/XII-2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017.
38. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Nomor 440/112/MOU/RSUD/BSK-2017 dan Nomor 800/1253.0/KP-XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Rujukan Pasien Jiwa.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Koordinasi dengan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Pengawasan Lembaga Asing dan Orang Asing (POA), Polres Tanah Datar dan Padang Panjang, Kodim 0307 Tanah Datar, Kejaksaan Negeri Tanah Datar, Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Pengadilan Negeri Batusangkar, Pengadilan Negeri Padang Panjang, Pengadilan Agama Batusangkar, Pengadilan Agama Padang Panjang, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar serta unsur vertikal lainnya.
2. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
3. Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan TNI/Polri berupa penertiban pasar, operasi pekat, warnet dan pengamanan hari-hari besar.

D. Pembinaan Batas Wilayah

1 Program Kerjasama Pembangunan

Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kegiatan ini berupa fasilitasi penyelesaian permasalahan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok.

2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Antar Desa/Nagari

Kegiatan ini berupa fasilitasi penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan antara Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dengan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara dengan Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara dan Nagari Pangian Kecamatan Lintau Buo, Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum dengan Nagari Parambahan dan Nagari Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum, Nagari Tabek Kecamatan Pariangan, Nagari Rambatan Kecamatan Rambatan.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Selama tahun 2017 telah terjadi bencana pohon tumbang sebanyak 53 kejadian sedangkan bencana lainnya seperti banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, erupsi gunung Merapi, orang hilang, dan lain sebagainya sebanyak 52 kejadian. Seluruh kejadian kebencanaan dapat diatasi dan ditindak lanjuti dengan upaya yang maksimal dengan menurunkan TRC dan Relawan/SAR.

F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada umumnya dapat dilaksanakan dengan baik pada event Tour De Singkarak, Festival Pagaruyung dan Pesta Rakyat, tradisi balimau masyarakat dan arus mudik perantau pada saat hari raya Idul Fitri 1438 H.

PENUTUP

Mengakhiri penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terimakasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, aparat keamanan, seluruh stakeholders pelaksana pembangunan serta pihak swasta dan masyarakat Kabupaten Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala do'a, usaha, langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Amin Yaa Robbal'alamin.

Wassalamu'alaikum.

BUPATI TANAH DATAR

ttd

Drs. H. IRDINANSYAH TARMIZI